

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Permasalahan Israel-Palestina berakar dari perkembangan sejarah panjang yang dialami oleh dua bangsa di negeri ini, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Kehadiran pertama orang-orang Yahudi di tanah ini sekitar tahun 1800 SM. Setelah sempat berhijrah ke Mesir selama beberapa abad lamanya, di bawah pimpinan Musa, mereka keluar dari Mesir untuk kembali ke Palestina pada sekitar abad 12 SM. Dari keadaan yang lemah dan terpecah-pecah, akhirnya warga Yahudi berhasil bersatu di bawah pimpinan Talut (Saul) dan membentuk sebuah kerajaan. Pada abad ke-10 SM, Daud putra Sulaiman mendirikan kuil pertama Jerusalem. Kerajaan Israel inilah, yang berlangsung kurang dari dua abad, yang telah meletakkan dasar religius dan emosional bagi kepentingan Yahudi di Palestina.

Sejak abad ke-8 sampai abad ke-7, negeri itu berturut-turut dikuasai oleh Assiria, Babylonia, Persia, Yunani dan Romawi. Kuil-kuil Yahudi, termasuk kuil pertama yang didirikan oleh Daud dihancurkan, sedang orang-orang Yahudi mengalami diaspora. Pada tahun 395 M negeri ini menjadi bagian Imperium Kristen Romawi Timur. Pada masa itu orang Yahudi sudah merupakan minoritas kecil.

Pada tahun 634 M, Palestina jatuh ke tangan Muslimin Arab di bawah pimpinan Umar Bin Khatab. Islampun berkembang pesat di Palestina dan sebagai akibatnya, penduduk Palestina saat itu merasa dirinya sebagai bagian dari dunia Arab.

Yahudi sebagai cikal bakal negara Israel merupakan bangsa tertindas yang sangat menderita, karena bangsa tersebut tidak memiliki negara. Puncak dari penderitaan tersebut adalah peristiwa “Holocaust”, dimana terjadi pembantaian enam juta orang Yahudi oleh tentara Nazi Jerman pada tahun 1945. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan tumbuhnya nasionalisme berkobar-kobar bangsa Jerman tentang anti ras semit termasuk di dalamnya adalah bangsa Yahudi. Dimana anggapan Nazi saat itu adalah Ras Aria yang paling unggul (termasuk bangsa Jerman) dibanding ras-ras lain.

Nasionalisme selain mempunyai dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif muncul ketika suatu bangsa mengidentifikasi dirinya sebagai suatu kelompok/group yang memiliki superioritas atas bangsa-bangsa lain. Namun demikian, tekanan Jerman saat itu telah mekar membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Yahudi sebagai embrio lahirnya negara Israel yang merupakan ancaman terhadap Palestina. Semenjak berdirinya negara Israel 14 Mei 1948, telah banyak pergantian demi pergantian pemimpin, dan kesepakatan-kesepakatan perdamaian untuk meredakan konflik Israel-Palestina. Tetapi semua itu belum bisa meredakan ketegangan yang terjadi antara dua negara tersebut hingga sekarang.

Kemenangan Ariel Sharon pada pemilu Israel tahun 2001, pasca terjadinya peristiwa Intifadhah sebagai aksi penentangan warga Palestina atas kehadiran tak bersahabat Sharon ke Al Aqsa, dan selanjutnya gencarnya agresi militer Israel tahun 2002 sebagai tindakan balasan kepada kaum militant Palestina pelaku bom bunuh diri yang secara perlahan memporakporandakan perekonomian Israel. Dan pada

kemenangannya yang kedua kali tahun 2003, mungkinkah masih ada harapan perdamaian ketika Ariel Sharon memenangkan pemilu tersebut yang diwujudkan melalui kebijakan Sharon untuk menarik pemukim Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai pelaksanaan dari salah satu point Rumusan Perdamaian Peace Road Map, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keputusan Sharon tersebut padahal ditelisik dari track record Sharon yang sebelumnya merupakan tokoh politik yang sangat agresif dan ekspansif terhadap Palestina.

Dari berbagai kebijakan politik Sharon tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah ini serta mewujudkannya dalam penulisan skripsi dengan judul :

“Faktor-Faktor Perubahan Sikap Ariel Sharon yang Semula Destruktif Menjadi Konstruktif Terhadap Proses Perdamaian (2001-2005)”

B. Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2000-2005 Sharon merupakan Perdana Menteri Israel yang sangat agresif, ide dan kebijakannya dianggap mampu memperluas Israel sekaligus melindungi kepentingan bangsa Yahudi di dunia internasional. Yang paling sulit dilupakan dari Sharon adalah Tragedi Shabra Shatila. Ia dikenal dengan nama “Penjagal Shabra Shatila” (*The Butcher of Shabra Shatila*). Peristiwa pembantaian sadis pada 16 September 1982 itu, terjadi di kamp pengungsi Shabra Shatila. Selama dua hari, milisi Kristen diberi keleluasaan oleh Israel (lewat komando Sharon) untuk

membantai pengungsi Muslim Palestina. Lebih dari 2000 Muslim (kebanyakan wanita dan anak-anak) tewas mengenaskan akibat peristiwa itu.¹

Gelombang aksi kekerasan Israel-Palestina yang dikenal sebagai Intifadhah Al Aqsa, bergulir begitu cepat dan luas. Intifadhah Al Aqsa muncul lantaran pemicunya adalah kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsa. Intifadhah Al Aqsa yang terjadi pada hari Kamis 12 Oktober 2000 di Ramallah, Tepi Barat, dimana massa Palestina membunuh dua dari empat satuan elite Israel dengan pisau dan kemudian membakar dua jasad tentara tersebut. Israelpun merasa tersinggung dengan perlakuan massa Palestina atas dua tentara elitnya yang mencoba menyusup ke Ramallah, namun tertangkap aparat keamanan Palestina. Aksi balas dendam Israel tidak tanggung-tanggung, yakni dengan membombardir Kota Ramallah dan Gaza City dengan tank Mirkava dan helikopter Apache.²

Aksi balas dendam Israel setelah itu berlarut-larut hingga agresi militer terbesarnya yang dilukiskan paling ekstrim sejak Perang Lebanon 1982 ke wilayah Palestina pada hari Jumat 29 Maret 2002, yang pada dasarnya memang mendapat dukungan sebagian besar rakyat Israel, Partai Buruh juga tidak mundur dari koalisi pemimpin PM Ariel Sharon. Bahkan Menteri Pertahanan Israel Benjamin Ben Eliezer yang juga merupakan ketua Partai Buruh, pada Jumat 5 April 2002 ikut berpidato mengumumkan agresi Israel ke wilayah Palestina.³ Artinya Partai Buruh sepenuhnya

¹ <http://meisusilo.wordpress.com/2009/03/04/apa-kabar-ariel-sharon/>

² Musthafa Abd. Rahman, *Jejak-Jejak Juang Palestina (Dari Oslo Hingga Intifadhah Al Aqsa)*, Kompas, Jakarta, Hal 200.

³ Ibid, hal 255.

terlibat dalam aksi militer saat itu. Jelas saat itu Sharon sedang berada di puncak kekuatannya, karena berhasil menyatukan hampir semua barisan partai politik di Israel, kecuali partai Meretz dan partai Arab-Israel.

Hubungan terburuk memang selalu terjadi ketika Ariel Sharon memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 1982 tatkala menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Pemerintahan PM Menachem Begin, yaitu terjadinya invasi besar-besaran ke Lebanon yang menjadi basis politik dan militer PLO saat itu. Sedang Tajuk Rencana harian Al Ahram hari Jumat 15 Maret 2002 mengkritik keras aksi pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina di kamp pengungsi Jenin, Balata, Jabaliya, Ramallah, Aida, Dir Balah dan Dehesisheh. Sejak awal hingga pertengahan Juni 2002, gugur sebanyak 180 warga Palestina yang sebagian besar di kamp pengungsi.⁴

Harian Al Ahram edisi Kamis 14 Juni 2002 juga menurunkan tajuk rencananya yang menyamakan tindakan Sharon setelah Intifadhah Al Aqsa dengan aksinya tahun 1982 di Lebanon dengan segala motivasinya. Menurut Al Ahram, hasil dari ulah Sharon saat itu dan juga pasca Intifadhah Al Aqsa akan menjadi sama yaitu kekalahan politik Ariel Sharon di Likud dan pasukan Israel dipaksa mundur. Isyarat itu tampak dari pemerintahan AS yang meminta Sharon segera menarik pemukim beserta pasukannya dari wilayah otoritas Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.⁵

⁴ Ibid, hal 235.

⁵ Ibid, hal 237.

Setelah kegagalan menyelesaikan fenomena Intifadhah Al Aqsa pada Maret 2000 dan klimaks dari dampak kegagalan tersebut terjadi pada 30 Maret 2002 ketika Sharon melancarkan aksi agresi besar-besaran ke Tepi Barat dan mengisolir pemimpin Palestina Yasser Arafat di markas besarnya di Mukataah, Ramallah. Agresi militer itulah yang kemudian mendorong pemerintah AS untuk kembali menggelar perundingan damai. Dan pada pertengahan 24 Juni 2002, AS kemudian memprakarsai konsep Peace Road Map yang berpedoman pada pidato Presiden AS George W. Bush tentang solusi penyelesaian konflik Israel-Palestina yaitu dengan *a two state solution*, dimana AS menjanjikan berdirinya negara Palestina tahun 2005 dengan perbatasan sementara juga mengenai penghentian pendudukan Israel atas tanah Palestina yang dijajah sejak 1967.⁶

Amerika Serikat dengan keunggulan status dan kekuatan politik yang dekat dengan Israel, akhirnya bersedia meningkatkan tekanan untuk memperlancar proses kesepakatan Peace Road Map. Dan atas kemenangan Sharon dalam pemilu Israel tahun 2003 mengantarkannya untuk mengambil kebijakan yang mengejutkan yaitu penarikan pemukim Yahudi sekitar 8000orang dari Jalur Gaza dan 300 pemukim lainnya di Tepi Barat. Rencana penarikan ini mendapat persetujuan awal dari Knesset dan berlaku pada Agustus 2005. keputusan ini tentu saja sangat mengherankan karena arah politik Sharon yang sebelumnya bersifat ekspansif terhadap Palestina. Pada mulanya kebijakan ini tidak mendapat dukungan bahkan dari Partai Likud sendiri.

⁶ <http://swaramuslim.com/more.php?id>.

Setelah Sharon mendapatkan dukungan dari 59 suara dan ditentang oleh 40 suara, maka keputusan ini kemudian disahkan kabinet pada Februari 2005.⁷

C. Rumusan Masalah

Dari serangkaian fenomena di atas maka dapat diambil permasalahan yang sangat menarik untuk dianalisa, yaitu: **faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kebijakan Sharon untuk menarik pemukim Israel di Jalur Gaza tahun 2005 padahal Sharon terkenal dengan sifatnya yang destruktif?**

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan teori Analisis Sistem Politik oleh David Easton.⁸ Suatu sistem memiliki beberapa sifat antara lain, pertama yaitu sistem terdiri dari banyak bagian, kedua bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling bergantung, ketiga sistem tersebut memiliki perbatasan (boundaries) yang memisahkannya dengan lingkungannya yang juga tersiri dari sistem-sistem lain. Dan sistem politik merupakan bagian dari sistem social yang menjalankan alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan), alokasi tersebut bersifat otoritatif (yaitu dikuatkan oleh kekuasaan yang sah), dan alokasi yang otoritatif itu mengikat seluruh masyarakat.

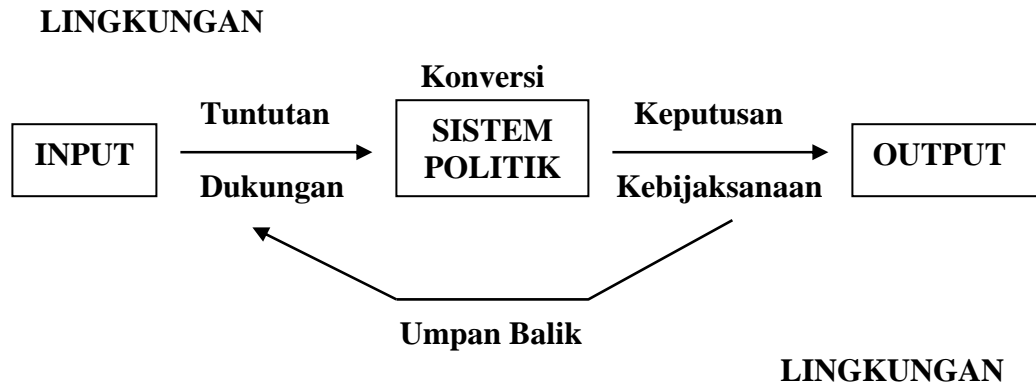
⁷ Ibid.

⁸ Mohtar Mas'ood, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, 2000. hal.3.

Studi politik berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Kita dapat berusaha memahami kehidupan politik dengan melihat segi-seginya satu persatu. Kita dapat menyelidiki berfungsinya lembaga-lembaga politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah dan voting. Lebih jauh kita bisa mempelajari sifat-sifat dan akibat dari praktek-praktek politik seperti manipulasi, propaganda dan kekerasan. Kita juga dapat meneliti struktur tempat terjadinya praktek-praktek ini. Dan dengan menggabungkan hasil-hasil penyelidikan itu kita dapat memperoleh suatu gambaran kasar tentang apa yang terjadi dalam setiap unit politik.

Dengan berpegang pada anggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat bahwa yang menjamin terus bekerjanya sistem politik tersebut adalah dengan adanya berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output dan selanjutnya output-output ini akan menimbulkan pengaruh terhadap sistem sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem tersebut berada. Rumusan tersebut sangatlah sederhana namun cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1. Skema Analisis Sistem Politik David Easton⁹



Sumber : Mohtar Mas' oed, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, 2000. hal.3.

Dapat dipastikan bahwa apabila Kita memilih sistem politik sebagai sasaran studi khusus, maka hal itu didasarkan pada alasan bahwa kita percaya kalau sistem politik memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yang berupa keputusan-keputusan otoritatif. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang dinamakan output.

Sedangkan untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input secara terus menerus. Tanpa adanya input sistem itu tidak akan dapat berfungsi. Sedangkan tanpa output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut.

⁹ Ibid, hal 5.

a. INPUT

Terdapat dua jenis pokok input dalam suatu sistem politik yaitu berupa tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi-informasi yang harus diproses oleh sistem tersebut dan juga sekaligus sebagai energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem tersebut.¹⁰

Tuntutan mempengaruhi perilaku suatu sistem dalam berbagai acara. Tuntutan itu merupakan suatu bagian penting dari bahan dasar yang diperlukan untuk bekerjanya suatu sistem. Tuntutan-tuntutan itu timbul dari dua bidang pengalaman. Mereka adalah tuntutan yang datang dari lingkungan di sekitar sistem tersebut dan bisa juga merupakan tuntutan yang berasal dari dalam sistem itu sendiri. Berdasarkan asal dari timbulnya tuntutan-tuntutan tersebut maka selanjutnya dapat disebut sebagai tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Sangat perlu bagi kita untuk membedakan tuntutan internal maupun tuntutan internal. Karena hal itu bukanlah input yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut melainkan sesuatu yang timbul dari dalam sistem itu sendiri dan karena konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan terhadap ciri suatu sistem politik lebih langsung daripada yang ditimbulkan oleh tuntutan eksternal.

Tuntutan sebagai bahan dasar bekerjanya suatu sistem politik, memiliki mekanisme tersendiri agar bisa diubah menjadi sebuah isu politik. Dalam hal ini isu adalah suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk dibahas melalui saluran-saluran yang diakui dalam

¹⁰ Ibid, hal 7.

sistem politik tersebut. Timbulnya suatu tuntutan baik internal maupun eksternal tidak akan begitu saja dapat menjadi sebuah isu politik. Banyak tuntutan yang mati begitu diajukan atau pengajuannya yang tidak lancer karena hanya didukung oleh golongan masyarakat yang kurang berpengaruh dan tidak pernah bisa masuk ke dalam tingkat pembuatan keputusan.

Input-input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik.¹¹ Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangai suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Input semacam ini disebut sebagai dukungan.

Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi. Bila tuntutan yang mengikat dan mereka yang ingin mempengaruhi menjadi proses-proses yang relevan harus mampu memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain dalam sistem tersebut.

Dukungan sebagai energi pendorong bekerjanya sebuah sistem politik yang mendorong input tuntutan agar dapat masuk ke dalam tingkat pembuatan keputusan dapat berupa tingkah laku yang dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan. Tingkah laku mendukung ada dua macam.¹² Pertama yaitu dapat berwujud tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan dan tindakan

¹¹ Ibid, hal 10.

¹² Ibid, hal 11.

orang lain, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Kedua, mungkin juga dapat berwujud memberikan suara yang mendukung pencalonan seorang pemimpin dalam pemilihan umum, atau membela serta mempertahankan suatu keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Namun tingkah laku mendukung tersebut ada kalanya tidak selalu berwujud sebagai tindakan terbuka yang tampak dari luar, namun juga dapat berupa suatu tingkah laku batiniah yang disebut pandangan atau suasana pemikiran.

b. OUTPUT

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahan dasar yang diperlukan bagi sebuah sistem politik dapat bekerja, menghasilkan keputusan-keputusan otoritatif yang berdampak langsung pada masyarakat adalah karena adanya input berupa tuntutan dan dukungan. Kedua macam input tersebut yang kemudian dapat masuk dalam tingkat pembuatan keputusan dalam sistem politik, dan melalui mekanisme khusus yang berlaku dalam sistem politik tersebut maka lahirlah apa yang disebut atau yang disebut sebagai konsekuensi-konsekuensi timbulnya keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif.

Output dari suatu politik adalah berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Sebagai sebuah hasil kerja sistem politik, maka sebuah output tetaplah memiliki kaitan dengan input yang berupa dukungan dan tuntutan yang telah berperan

penting sebagai bahan dasar terbentuknya output berupa keputusan atau kebijaksanaan politik.¹³

Output yang dipahami sebagai konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari bekerjanya sebuah sistem politik yang menghasilkan keputusan dan kebijaksanaan adalah sebuah prodek yang lahir dari tuntutan dan dukungan yang timbul dari masyarakat. Sebuah kebijakan politik timbul dari adanya suasana yang mungkin mendukung atau bahkan menolak lahirnya kebijaksanaan politik yang dihasilkan sistem politik tersebut. Hal inilah yang bisa dipahami bahwa terdapat sebuah hubungan yang erat antara masyarakat sebagai salah satu sumber utama timbulnya input dengan output sebagai hasil dari pengolahan input yang memiliki konsekuensi langsung atas penerapannya di dalam masyarakat.

Karena output-output khas dari suatu sistem adalah keputusan kebijaksanaan politik, maka pada pemerintahan terletak tanggungjawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.¹⁴ Keputusan sebagai hasil pengolahan input memiliki arti sebagai pertanggungjawaban terhadap input yang timbul dalam masyarakat. Di depan tadi telah Kita bahas bahwa bentuk dan macam input, sedikit banyak akan mempengaruhi bentuk dan hasil berupa output keputusan dan kebijaksanaan politik. Sebaliknya, keputusan atau kebijaksanaan politik yang timbul haruslah sesuai dengan input yang mendasarinya. Hal inilah yang sering dianggap sebagai ukuran optimalnya sebuah

¹³ Mohtar Mas' oed, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, 2000. hal.15.

¹⁴ Ibid, hal 15.

sistem politik dalam hal pembuatan keputusan. Artinya sistem politik yang baik dikenal sebagai sistem politik yang menyusun kebijakan atau output yang selaras dengan input yang mendasarinya. Secara sederhana, apa yang menjadi tuntutan dalam masyarakat dapat dituangkan dalam kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat tadi.

E. Hipotesa

Berdasar dari latar belakang masalah, kejadian, fakta di atas maka dapat diambil suatu gambaran bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penarikan pemukim Israel. Ariel Sharon merubah sikap dari destruktif menjadi konstruktif terhadap perdamaian karena untuk mempertahankan posisi karir politiknya yaitu dengan latar belakang berupa tuntutan baik dari internal maupun eksternal lingkungan sistem tersebut, yaitu antara lain :

1. Faktor Internal

a. Ekonomi Israel yang semakin kritis

b. Mempertahakan Pamor Politik Sharon

2. Faktor Eksternal

a. Aksi Bom Bunuh Diri Palestina

b. Inisiatif Peace Road Map

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk lebih mengenal dan menganalisa konflik-konflik kritis yang terjadi antara Israel-Palestina, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan kontroversial Ariel Sharon.
2. Penerapan dari seluruh mata kuliah yang penulis dapat ketika masih duduk di bangku perkuliahan.

G. Jangkauan Penelitian

Supaya di dalam pembahasan ini tidak terlalu luas dan melenceng jauh dari kajian masalah menjadi lebih mudah dimengerti, maka penulis hanya menekankan tentang berbagai faktor yang melatarbelakangi perubahan sikap Sharon yang semula destruktif menjadi konstruktif terhadap proses perdamaian dengan Palestina, yaitu dengan mengambil kebijakan yang sangat kontroversial untuk menarik pemukim Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 2005, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang berupa tuntutan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan luar negeri. Tuntutan dari dalam negeri yaitu antara lain ekonomi Israel yang semakin kritis dan juga tuntutan dari diri pribadi Sharon sebagai aktor pengambil kebijakan nasional untuk mempertahankan pamor politik Sharon. Sedangkan tuntutan dari lingkungan luar negeri yaitu gencarnya aksi bom bunuh diri dari militant Palestina dan juga karena adanya Rumusan Perdamaian Peace Road Map

dimana dalam salah satu point tersebut menyebutkan agar Israel menghentikan pendudukannya terhadap wilayah Palestina semenjak tahun 1967.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai penulis dalam pengumpulan data adalah berupa studi dokumen tidak terstruktur yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi dari literature-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan pertimbangan berikut :

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dalam penjabarannya untuk mengkaji peristiwa masa lalu menurut urutan waktu (kronologis). Kesenambungan masa lalu dengan masa sekarang dapat dihubungkan sehingga dapat dilihat apakah suatu peristiwa mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada saat ini atau yang akan datang.
2. Penelitian ini lebih bersifat eksploratif dan deskriptif, dimana data-data yang bersumber dari data sekunder dieksplorasi kemudian diberikan gambaran suatu fenomena dengan berbagai aspek yang terkait dengan fenomena tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi ini skripsi sehingga antara satu dengan lainnya saling berkaitan, maka penulis disini akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Peran Sharon Dalam Konflik Berkepanjangan Israel-Palestina, menjelaskan tentang Akar konflik Berkepanjangan Israel Palestina, berupa Zionisme Sebagai Awal Terbentuknya Israel, Sejarah Konflik Yang Lahir Dari Agama dan Perang Salib Sebagai Awal Perbenturan Antara Nasrani, Yahudi dan Islam. Serta mengenai Pemisahan Wilayah Palestina Oleh PBB dan juga Kunjungan Sharon Sebagai pemicu Intifadhah Al Aqsa tahun 2000.

BAB III. Perubahan Kontroversial Politik Sharon, membahas mengenai Kondisi Politik Dalam Negeri seperti Sistem Politik Israel, Karir Politik Sharon dan Dinamika Partai Likud. Agresi Militer Israel Terhadap Palestina dan juga Penarikan Pemukim Israel Dari Jalur Gaza.

BAB IV. Faktor-Faktor Penyebab Melunaknya Kebijakan Sharon, antara lain berupa tuntutan dari Faktor Internal yaitu Ekonomi Israel yang Semakin Kritis dan juga Mempertahankan Pamor Politik Sharon. Sedangkan faktor eksternal yaitu aksi bom bunuh diri Palestina dan juga inisiatif Peace Road Map.

BAB V. Kesimpulan, membahas mengenai kesimpulan dari permasalahan di atas.